

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Sebutan sebagai negara agraris tersebut tidaklah tanpa alasan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di perdesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia secara umum adalah: (1) membentuk Produk Domestik Bruto (PDB); (2) salah satu sumber penghasil devisa; (3) penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri; (4) salah satu sektor yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan; (5) penyedia lapangan kerja; (6) salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat; dan (7) salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional (Kuncoro M, 2010: 289).

Pembangunan pertanian menghasilkan perubahan-perubahan: (1) dalam susunan kekuatan dalam masyarakat, (2) dalam produksi, produktivitas, dan pendapatan, (3) dalam alat-alat dan bahan produksi, (4) dalam tujuan ekonominya dari subsisten ke komersial, dan (5) dalam corak sosial dan tertutup ke arah terbuka. Jadi pembangunan pertanian berkepentingan pada perubahan pertanian dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat pertanian maupun masyarakat pada umumnya (Yuwono *et al.*, 2011:16).

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Di pedesaan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Permasalahan mendasar mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi masalah dan persoalan tersebut pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah yang fokus pada pembangunan pertanian pedesaan. Salah satunya

ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan (Anonim, 2009 dalam Darmawan W.B, 2011: 13).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menetapkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2008 dimana tujuan program ini adalah untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis dengan sasaran kemiskinan dan pengangguran pedesaan. PUAP merupakan program kementerian pertanian bagi para petani perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan memberikan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dimulai sejak tahun 2008. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah disalurkan sebagian besar kepada gapoktan-gapoktan dengan nilai Rp 1,0573 triliun dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta. Penyaluran dana PUAP disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP (Lestari Y.D, 2014: 5).

Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2015 presentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 18,32 % angka ini naik dibandingkan tahun 2014 yaitu 17,41 %, yang artinya kurun waktu 6 bulan naik 0,91 %. Penduduk miskin daerah perkotaan dan pedesaan selama September 2014 – Maret 2015 mengalami kenaikan. Di perkotaan naik dari 6,24 % pada September 2014 menjadi 6,48 % pada Maret 2015, berarti terjadi kenaikan sebesar 0,24 %. Sedangkan daerah pedesaan terjadi kenaikan sebesar 1,41 %, yaitu dari 23,21 % pada September 2014 menjadi 24,62 % pada Maret 2015. Jumlah penduduk miskin September 2014 sebanyak 195.096 orang. Dengan demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2014 – Maret 2015 bertambah sebanyak 11.747 orang. Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 87,32 % dan sisanya 12,68 % tinggal di

perkotaan dari total jumlah penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2015).

Berdasarkan hasil survei di Kota Gorontalo merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Gorontalo yang memperoleh program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program ini dimulai dari tahun 2008 hingga saat ini. Di kota ini terdapat beberapa gabungan kelompok tani yakni diantaranya Gapoktan Teratap Lestari di Kota Tengah dan Gapoktan Sinar Tani di Kota Utara. Program PUAP ini perlu diidentifikasi karena selain untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut juga dapat mengetahui implementasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai dana bantuan dari pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan petani khususnya kepada petani padi sawah. Namun ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dilokasi salah satunya pengembalian dana yang berangsur lambat. Akibatnya sistem agribisnis pada program ini belum terlaksana sesuai tujuan program karena keterlambatan pengembalian hasil usaha dari anggota masyarakat petani yang mengakibatkan program ini mengalami kendala pada pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian di Kota Gorontalo dengan memilih judul “Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Padi sawah di Kota Gorontalo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap peningkatan pendapatan petani padi sawah di Kota Gorontalo?
2. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh petani dalam pengembalian dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kota Gorontalo?
3. Bagaimana dampak Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap peningkatan pendapatan petani padi sawah di Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap peningkatan pendapatan petani padi sawah di Kota Gorontalo.
2. Kendala yang sering dihadapi oleh petani dalam mengembalikan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kota Gorontalo.
3. Dampak Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap peningkatan pendapatan petani padi sawah di Kota Gorontalo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan instansi terkait agar lebih memperhatikan permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis terhadap gabungan kelompok tani yang ada di daerah tersebut.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat petani mengenai Program PUAP sekaligus mensinergikan antara Perguruan Tinggi yakni mahasiswa, pengurus GAPOKTAN, Penyedia Mitra Tani, Penyuluh Pendamping, khususnya dalam hal ini masyarakat tani itu sendiri pada umumnya.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan atau bahan perbandingan penelitian dalam bidang yang sama, serta untuk memperluas pengetahuan.